



# Buletin Parlementaria

Nomor 1201/1/VI/2022 • Juni 2022

## DPR Sahkan Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi UU



3 Puan Maharani  
Apresiasi Kontingen  
Indonesia Raih 3 Besar  
SEA Games 2021



6 Komisi II: Pemilihan  
Kepala Desa Butuh  
Perhatian Serius



9 772614 339005





Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II. Foto: Jaka/rvi

# DPR Sahkan Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi UU

**D**PR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU P3) menjadi undang-undang (UU). RUU P3 yang disahkan dalam Rapat Paripurna ini selanjutnya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami akan menanyakan kepada Anggota apakah Rancangan Undang-

Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat disetujui disahkan menjadi UU?” tanya Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani pada peserta Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5). Tidak lama setelah itu, seluruh anggota yang hadir secara fisik dan virtual menjawab ‘setuju’.

Sebelum disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M.

Nurdin menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU P3 di hadapan Rapat Paripurna. Ia menyebut hasil pembahasan tingkat satu disetujui oleh delapan fraksi. Satu fraksi yang menolak adalah Fraksi PKS. “Setelah melakukan pembahasan 365 DIM dengan pemerintah, pada 13 April 2022 malam hari, Baleg menggelar raker bersama pemerintah dan DPR RI, pemerintah diwakili fisik Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan perwakilan Kemenkumham,” kata Nurdin.

Pada kesempatan tingkat pertama itu disepakati peralihan perundangan yang mulanya di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), kemudian disepakati pemerintah dan DPR RI menjadi di Sekretariat Negara (Setneg) yang diatur dalam RUU P3. Keputusan tersebut ditetapkan pada 13 April 2022, dalam rapat Pleno Baleg DPR RI yang juga dihadiri Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Polhukam Mahfud MD. ■ hal/sf



# Puan Maharani Apresiasi Kontingen Indonesia Raih 3 Besar SEA Games 2021

**K**etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengapresiasi capaian kontingen SEA Games 2021 Indonesia yang berhasil meraih juara tiga pada klasemen final. Dalam pesta olahraga Asia Tenggara di Hanoi, Vietnam itu, Tim Merah Putih berupaya memperbaiki peringkat sebelumnya di Filipina yang lalu.

“Selamat untuk tim SEA Games Indonesia yang telah keluar sebagai juara ketiga. Prestasi yang ditorehkan oleh atlet dan seluruh tim sangat luar biasa dan tentu menjadi kebanggaan bangsa. Salut untuk Tim Merah Putih,” terang Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/4).

Berdasarkan informasi yang dirinya terima, Indonesia berhasil memboyong 69 emas, 92 perak, dan 81 perunggu. Secara khusus, Puan bersuka cita karena Indonesia, pertama kali, berhasil mendapatkan emas untuk cabang olahraga Basket, setelah mengalahkan Filipina.

“Kita berhasil mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya sejak mengikuti SEA Games pada 1977, tim basket Indonesia bisa mendapatkan medali emas. Apalagi Indonesia berhasil mengalahkan negara unggul di cabang olahraga basket. Kini Timnas Basket Putra Indonesia sudah diperhitungkan di level Asia Tenggara,”



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/mv

ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu, tidak ada hal yang mustahil untuk didapatkan dengan kerja keras dan semangat gotong royong. Ia mengatakan, tim Merah Putih juga patut berbangga karena berhasil menang dari rival abadi di SEA Games, yakni Malaysia. “Kita juga bersyukur tim Indonesia mampu mencapai target masuk 3 besar. Semua atlet telah menunjukkan performa terbaiknya,” tutur politisi PDI-Perjuangan tersebut. ■ ts/sf



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Jr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Wiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irianidi, Surahmat Eko Budi Setiantono, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnarcha Firista Dysis, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Prima Danurtiro, A.Md, Naefurroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciiani, Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Christa Dwipa  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



# Komisi I Desak Kominfo Atasi Kendala Distribusi STB di Jawa Tengah

**W**akil Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Digitalisasi Penyiaran Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk segera mengatasi permasalahan terkait dengan masalah distribusi *Set Top Box* (STB), khususnya di wilayah Jawa Tengah. Menurutnya hal ini penting dilakukan melihat mepetnya jadwal *switch off* untuk Jawa Tengah dan tentunya untuk mempercepat

kesiapan dalam mendukung program *Analog Switch Off* (ASO).

“Yang belum adalah terkait distribusi *Set Top Box* (STB). Ada beberapa permasalahan yaitu kendala distribusi dan kendala instalasi yang ini saya kira harus segera diatasi sebelum di Jawa Tengah dimulai *switch off*, karena Jawa Tengah baru *switch off* di periode kedua,” jelas Kharis saat memimpin pertemuan Komisi I DPR RI dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos Informatika (PPI) dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo RI di Solo, Jateng, Jumat (20/5).

Selain masalah distribusi STB, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta adanya solusi dari aspirasi TV komunitas terkait dengan peninjauan tarif multipleksing. Karena TV komunitas tidak memungut biaya iklan dalam menjalankan aktivitasnya.

“Kita mendengarkan aspirasi dari teman-teman TV komunitas, karena mereka tidak memiliki iklan, sehingga meminta agar peninjauan terhadap tarif multipleksing yang dibebankan kepada mereka. Mudah mudahan akan ada solusi terbaik, tapi kita sepakat *Analog Switch Off* (ASO) 2 November 2022 harus sukses,” tutur Kharis lebih lanjut.

Oleh karena itu, Kharis terus mendorong sinergi dari *stakeholder* untuk terus meningkatkan koordinasi baik itu teknis maupun sosialisasi agar lebih banyak masyarakat yang paham dan mendukung program ASO ini. “Kesiapan sosialisasi dalam program ini juga harus terus di tingkatkan agar masyarakat lebih memahami lagi banyaknya keunggulan dari program ini,” tutup legislator dapil Jateng V tersebut. ■ pdt/sf



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Kunspek Komisi I DPR RI ke Solo. Foto: Prima/nvl



# Komisi I Pesimis Program ASO Bisa Capai Target November 2022



Foto bersama Tim Kunspek Panja Digitalisasi Penyiaran Komisi I DPR RI di Yogyakarta. Foto: Runi/nvl

**A**nggota Komisi I DPR RI Junico BP Sihaan mengaku pesimis implementasi Program *Analog Switch Off (ASO)* bisa mencapai target pada November 2022. Pasalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), atau penyelenggara *multipleksing* dalam mekanisme pelaksanaan belum terlihat optimal, dan juga komunikasi antara pihak-pihak terkait belum berjalan dengan baik. Sehingga program ASO di lapangan belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Demikian dikemukakan Nico usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Digitalisasi Penyiaran Komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyelenggara

”

**SEMUA ITU TERJADI  
DISEBABKAN KARENA  
PERLU BIAYA  
TAMBAHAN YANG  
SANGAT BESAR YANG  
HARUS DIKELUARKAN  
TIDAK HANYA  
UNTUK DISTRIBUSI  
SAJA, NAMUN ADA  
ANGGARAN TAMBAHAN  
UNTUK PEMASANGAN  
INSTALASI YANG PERLU  
DIKELUARKAN**

Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kominfo Ismail, para penyelenggara *multipleksing*, TV Penyiaran Yogyakarta,

Komunitas TV Digital dan Ketua Gabungan Pengusaha Elektronik Indonesia, di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (21/5).

“Walaupun pada dasarnya sudah ada komitmen Kominfo dan televisi-televisi swasta untuk pendistribusian jumlah *Set Top Box (STB)*, akan tetapi pada kenyataan di lapangan sangat tidak mudah. Permasalahan yang terjadi yakni terkait pendistribusian STB, dan mekanisme pelaksanaan yang masih kurang. Semua itu terjadi disebabkan karena perlu biaya tambahan yang sangat besar yang harus dikeluarkan tidak hanya untuk distribusi saja, namun ada anggaran tambahan untuk pemasangan instalasi yang perlu dikeluarkan. Untuk itu saya mendorong pihak-pihak terkait untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan yang ada saat ini,” pinta Nico.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengingatkan bahwasanya para penyelenggara *multipleksing* atau televisi swasta agar segera dapat menyelesaikan komitmennya dalam menjalankan program ASO. Apapun permasalahannya harus ada jalan keluar yang diberikan agar program dari pada ASO bisa terlaksana dengan baik, demi terwujudnya digitalisasi penyiaran nasional yang berkualitas.

“Saya dan Anggota Komisi I akan mengundang pihak-pihak terkait, yakni Kominfo serta para Direksi Televisi Swasta untuk melakukan pertemuan duduk bersama guna membicarakan apa saja yang menjadi kendala dan hambatan saat ini. Diharapkan nantinya ada komunikasi yang baik dan persoalan yang ada bisa terselesaikan. Seperti halnya saat ini pendistribusian STB masih tersendat, dan itu menjadi suatu pertanyaan, apakah persoalan anggaran atau masalah verifikasi dan validasi data yang berhak menerima STB gratis, itu semua harus ada solusi yang diberikan. Jangan sampai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, dimana target dari pada ASO sendiri November 2022, tidak bisa terlaksana pasalnya program tersebut merupakan indikatornya,” papar Nico. ■ rmi/sf



# Komisi II: Pemilihan Kepala Desa Butuh Perhatian Serius

**S**etelah moratorium pemilihan selama dua tahun karena Covid-19, kini pemilihan kepala desa (Pilkades) di sejumlah daerah mulai digelar. Pesta demokrasi di tingkat paling bawah justru lebih dinamis dengan tingkat kerawanan yang juga tinggi. Butuh pembinaan bagaimana berdemokrasi di desa tetap berkualitas.

Ditemui di Kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara, Rabu (25/5), usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyerukan, agar Pilkades di semua daerah menjadi perhatian serius. Pilkades tidak saja jauh lebih dinamis daripada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tapi banyak mengundang konflik sosial.

“Pemilihan kepala desa jauh lebih dinamis dibanding Pilkada. Semakin ke bawah, peristiwa demokrasi sebenarnya semakin rawan, mengundang konflik sosial. Karena *locus*-nya kecil, interaksinya intensif, tarik menarik kepentingannya menonjol, maka sering sekali menimbulkan konflik, bahkan pemilihan kepala desa itu memakan korban jiwa,” ungkap Doli.

Perhatian pusat sangat dibutuhkan ketika Pilkades berlangsung di sejumlah daerah, pinta politisi Partai Golkar itu. Begitu pula di Kabupaten Langkat, Sumut, yang dikunjungi Komisi II DPR. Ada 162 desa di Langkat yang akan berpesta demokrasi. Pembinaan demokrasi jadi

keniscayaan, agar Pilkades bisa lebih sehat dan tertib. “Ini harus jadi perhatian kita supaya pembinaan demokrasi di masyarakat paling bawah ini sehat,” ujarnya.

Doli melanjutkan, di tengah akan dimulainya Pilkades di sejumlah daerah, ini jadi

momentum terbaik untuk mengevaluasi pemerintahan desa, baik penataan kelembagaan maupun regulasinya. Komisi II sendiri, sambung legislator dapil Sumut III ini, sedang mengagendakan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya memuat aturan pemerintahan desa.

“Sejak awal kami sudah masukkan revisi atau penyempurnaan UU Pemerintahan Desa. Ini jadi entitas paling kecil dalam struktur pemerintahan kita. Kalau desa-desa secara simultan mempercepat pembangunan desa, itu akan mempercepat pembangunan kecamatan dan

kabupaten. Oleh karena itu, kita harus mempunyai perhatian khusus. Apalagi, dana desa makin lama, makin besar,” papar Doli.

■ mh/aha



Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Husen/nvl



# Jadi Ujung Tombak Penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Desa Perlu Mendapat Pembinaan

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengakui, dengan jumlah lebih dari 80 ribu desa di seluruh Indonesia, banyak persoalan desa yang sangat *complicated* (rumit). Di antaranya terkait masa jabatan kepala desa, klasifikasi pendidikan kepala desa, hingga kesiapan perangkat desa dalam melayani masyarakat. Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, Syamsurizal menilai perangkat desa perlu mendapat pembinaan maupun pendidikan, sehingga mereka dapat menjadi alat bagi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.

“Kita mendapat informasi perangkat desa sudah mulai melaksanakan pendidikan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri yang menyalurkan tenaga pengajarnya, dan pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dapat menyelenggarakan pendidikan kepada perangkat desa,” kata Syamsurizal usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran Pemerintah

Kabupaten Maros, perwakilan APDESI Maros, dan beberapa camat dan kepala desa se-Maros, di Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (25/5).

Namun dalam implementasinya di lapangan, penyelenggaraan pendidikan atau pembinaan tersebut mendapat kritik, mengingat belum adanya kurikulum yang mendukungnya. “Saya pikir program ini masih baru. Kita akan merumuskan dan mengkaji, bagaimana pola pendidikan yang baik kepada kepala desa. Dari ribuan desa itu, berapa banyak perangkat desa dan anggarannya. Pemberian pembekalan itu karena mereka jadi ujung tombak, sehingga pengasahnya juga harus tajam dan kuat, sehingga mereka memiliki dedikasi untuk membangun bangsa dan negara melalui potensi daerah yang dimiliki,” jelas Syamsurizal.

Di sisi lain, terkait pengawasan kinerja kepala desa dan jajaran perangkat desa, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, kinerja perangkat desa memang perlu diawasi, agar sumber daya aparatur desa bisa dioptimalkan. Sehingga menurutnya klasifikasi pendidikan kepala desa menjadi hal yang penting. “Klasifikasi pendidikan menjadi salah satu hal yang perlu kita angkat. Misalnya, kalau perlu ke depan syarat SMA menjadi syarat mutlak untuk menjadi kepala desa,” tandas Syamsurizal. ■ sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal bertukar cenderamata dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Foto: Sofyan/mvl



# Komisi II Soroti Kapasitas SDM di Desa

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyoroti kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas kerja yang optimal di tingkat daerah dan desa. Menurutnya hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Terlebih, ke depan era kerja akan didominasi teknologi informasi data yang bergerak cepat, sehingga problematika SDM tersebut harus bisa diselesaikan oleh pemerintah.

“Kita sudah bisa mapping problem pemerintahan desa, misalnya yang berkaitan dengan kualitas manusia. Saya kira artinya skala utama yang harus menjadi perhatian bersama yang disebut SDM itu tentu yang ujung tombaknya adalah kepala desa dan perangkat desa,” ujar Yanuar usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu (25/5).

Kemudian, lanjut Yanuar, akurasi data menjadi masalah lain yang dikeluhkan kepala desa. Permasalahan ini terlihat dari berbeda atau tidak sinkronnya data yang ada di tingkat desa dengan tingkat pusat. “Saya *enggak* tahu di mana duduk perkara hilangnya data atau menumpuknya data. Kira-kira begitu dari bawah 300, (di) atas tinggal dua. Turun ke bawah tinggal satu, ini di mana duduk perkaranya. Tapi kalau dalam soal urusan BLT (bantuan

langsung tunai), (atau) bantuan-bantuan begitu ini kan jadi masalah ke depannya,” lanjut politisi PKB tersebut.

”

**PEMERINTAH PERLU MEMPERHATIKAN BAHWA KONDISI TIAP DESA TIDAK DAPAT DISERAGAMKAN. “LUASNYA NGGAK SAMA, JUMLAH WARGANYA ENGGAK SAMA, ORANG YANG TERDAMPAKNYA ENGGAK SAMA, SEHINGGA INI MEMERLUKAN APA YANG DISEBUT DENGAN DIVERSIFIKASI ATAU KLASIFIKASI DESA DESA**

Masalah lainnya yakni, kesejahteraan perangkat desa menjadi hal penting perlu diperhatikan, meski setiap desa memiliki otonomi atau kemandiriannya. Menurutnya, karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Sebab, apapun pembahasannya di tingkat provinsi maupun kabupaten, desa tetap menjadi ujung tombaknya karena masyarakat lebih dekat dan terhubung dengan pemerintah desa. “Jadi soal-soal kesejahteraan perangkat desa ini perlu menjadi perhatian,” imbuh Yanuar.

Catatan lainnya, yakni sebagaimana diketahui ada kebijakan baru yakni minimal sebesar 40 persen dari dana desa diberikan untuk bantuan sosial. Yanuar menilai, kebijakan tersebut sesungguhnya memiliki arah dan tujuan yang baik, terlebih sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan pandemi Covid-19. Meski demikian, ia menilai bahwa pemerintah perlu memperhatikan bahwa kondisi tiap desa tidak dapat diseragamkan. “Luasnya *enggak* sama, jumlah warganya *enggak* sama, orang yang terdampaknya *enggak* sama, sehingga ini memerlukan apa yang disebut dengan diversifikasi atau klasifikasi desa desa,” jelas Yanuar. ■ hal/sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin. Foto: Devi/nvl

# Legislator Usul RUU Narkotika Atur BUMN Ikut Serta Bangun Panti Rehabilitasi Narkoba

**A**nggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mengusulkan dalam Perubahan Kedua Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika) memasukkan norma-norma keikutsertaan BUMN untuk turut serta berpartisipasi dalam membangun panti-panti rehabilitasi pengguna narkoba. Tujuannya, agar beban rehabilitasi tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Daerah akan tetapi juga kepada BUMN dan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki peran serta dalam membangun panti rehabilitasi.

Demikian disampaikan Adde saat Rapat Panja RUU Komisi III DPR RI dipimpin Ketua Panja RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika) yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dan jajaran terkait penjelasan umum substansi RUU tentang Narkotika di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/5).

“Ke depannya tempat panti rehabilitasi harus banyak dibangun agar pengguna narkoba khususnya pengguna satu gram ke bawah bisa direhabilitasi. Hal ini penting

juga harus disiapkan juga panti-pantinya. Oleh karena itu, usulan masukan saya yaitu norma-norma terkait keikutsertaan BUMN untuk turut serta berpartisipasi membangun panti-panti rehabilitasi harus dimasukkan ke dalam pasal RUU Narkotika ini,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Selain itu, Adde menekankan adanya sinergi Kemenkumham dengan BPOM selain juga dengan Kementerian Kesehatan. Mengingat, sebagaimana diketahui hingga kini masih terdapat adanya macam-macam obat tidak masuk golongan narkoba atau psikotropika serta tidak masuk juga ke dalam lingkup obat-obatan. Maka, diharapkan sinergi Kemenkumham dengan BPOM harus segera terwujud agar jelas mana yang tergolong obat dan mana yang tergolong narkoba berdasarkan RUU Narkotika.

“Di sisi lain, sebagaimana dalam Pasal 55 B ayat 2 disampaikan bahwa ‘rehabilitasi telah menjalani proses hukum atau tidak lebih dari dua kali yang diterbitkan BNN. Pertanyaannya, apa alasannya kenapa harus dua kali? Kenapa tidak satu kali



Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa. Foto: Jaka/mvl

saja kemudian bisa langsung masuk rehab. Jadi menurut saya, satu kali saja sudah cukup dan jangan menunggu sampai dua kali,” tandas Adde Rosi.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Banten I itu mengingatkan jangan sampai artian dua kali rehabilitasi yang dikeluarkan BNN itu dikesankan seolah-olah mentoleransi penggunaan narkotika yang masuk rehabilitasi. “Karena, Komisi III DPR RI menginginkan agar UU Narkotika ini adalah UU yang paripurna dan UU yang spesial yang dilahirkan oleh DPR RI tahun ini,” pungkas Adde Rosi. ■ pun/aha



# Komisi IV Minta Kementan Buka Data Asal Muasal Penyebaran PMK

**M**enanggapi semakin meningkatnya penyebaran penyakit mulut dan kaki (PMK) di Indonesia, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin secara tegas meminta Kementerian Pertanian (Kementan) agar terbuka mengungkapkan asal muasal penyebaran PMK pada hewan ternak. Pasalnya, dirinya menerima informasi ada dugaan penyebaran berasal dari negara India.

“Saya ingin tahu, asalnya dari mana, apakah (PMK) dari India? Jujur saja, karena masuknya dari Jawa Timur, ada yang bilang dari Gresik, ada yang bilang dari Aceh. Bagaimana mau tahu vaksinnya kalau asal muasalnya tidak tahu. Atau bisa saja, pihak karantina yang lalai bisa saja,” tegas Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Dirut Perum Bulog, dan PT Berdikari di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (23/5).

Di sisi lain, politisi PDI-Perjuangan itu menekankan penanganan PMK ini harus saling koordinasi antar kementerian, lembaga, dan unsur lainnya, bukan saling menyalahkan. Sehingga penyebaran PMK segera ditekan dan ditangani dengan tepat.

Hal ini menjadi urgen, karena pada Agustus mendatang, permintaan daging sapi oleh masyarakat akan melonjak jelang Hari Raya Iduladha.

Menyoroti soal vaksinasi hewan ternak, Sudin menyayangkan pemerintah yang diwakili Kementan belum memiliki rencana matang untuk memperoleh bibit sekaligus produksi vaksinasi PMK di Indonesia. Sedangkan, vaksinasi PMK yang ditargetkan oleh Kementan dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2022.

Oleh karena itu, legislator dapil Lampung I tersebut

meminta Kementan membuat rencana alternatif mencegah penyebaran PMK di Indonesia. Satu di antaranya menyalurkan disinfektan sebanyak-banyaknya kepada peternakan yang belum terkontaminasi oleh PMK. “PMK ini lebih jahat dari (virus Covid-19) Omicron,” pungkas Sudin.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjabarkan Kementan telah melakukan sebelas langkah darurat. Seperti, memusnahkan ternak yang terkonfirmasi positif, melakukan karantina dengan radius 3-10 km di wilayah yang terdampak PMK, membentuk gugus tugas tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sosialisasi dan edukasi SOP Pencegahan dan Pengendalian PMK.

Kemudian, menghentikan sementara layanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di daerah wabah PMK, mengendalikan lalu lintas ternak antar provinsi oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; lalu lintas antar kabupaten dan kota dikendalikan oleh gubernur; dan lalu lintas antar kecamatan oleh bupati dan wali kota. ■ ts/sf

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin.  
Foto: Arief/rvl



# Negara Harus Hadir Atasi Penderitaan Banjir Warga Bojongkulur Kabupaten Bogor

**K**omisi V DPR RI menerima audiensi Kepala Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor, bersama dengan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi - Cikeas (KP2C). Dalam audiensi yang diterima oleh Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi dan Anggota Komisi V DPR RI Sudewo ini, Komisi V DPR RI dengan warga mendiskusikan terkait bencana banjir akibat meluapnya Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas yang semakin tahun semakin meningkat.

Setelah menerima keluhan dan aspirasi dari pihak warga Desa

Bojongkulur, Mulyadi menekankan agar pemerintah hadir dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh warga negara. "Pada saat bapak silaturahmi ke rumah aspirasi, saya langsung berpikir bagaimana caranya supaya ini menjadi perhatian pemerintah melalui Dirjen Sumber Daya Air," papar Mulyadi usai mendengarkan keluh kesah warga Bojongkulur, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5).

Dalam audiensi tersebut, Puarman dari KP2C yang merupakan komunitas wilayah terdampak banjir Sungai Cileungsi - Cikeas, Kali Bekasi

mengungkapkan, penyebab banjir menahun tersebut lantaran hampir semua tanggul dalam kondisi rapuh dan bolong, adanya pendangkalan sungai, selain itu juga terjadi penyempitan sungai, dan terjadinya perubahan tata guna lahan di hulu.

Oleh sebab itu para warga Bojongkulur meminta solusi pencegahan banjir dengan cara normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, membuat tanggul permanen, dan melanjutkan normalisasi kali bekasi. "Permintaan kami, normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas," tandas Puarman.

Merespon hal tersebut, Mulyadi yang merupakan legislator dapil Jawa Barat V ini mengapresiasi kepedulian komunitas terhadap derita warga yang terdampak banjir. "Saya mengapresiasi dari komunitas bapak yang dengan secara swadaya yang memberikan upaya-upaya terbaik untuk menjaga masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, ia akan mengajukan permasalahan ini kepada kementerian terkait, agar ke depan ada penanganan yang serius. Lebih dari itu Anggota Badan Anggaran DPR RI ini akan mengawal masalah ini di tingkat perancangan anggaran. ■eko/aha



Komisi V DPR RI menerima audiensi Kepala Desa Bojongkulur Kabupaten Bogor bersama dengan KP2C. Foto: Arief/mvl



# Komisi VI Terima Aspirasi Paguyuban Robot Trading Member DNA Pro



Komisi VI DPR RI menerima audiensi Paguyuban Robot Trading Member DNA Pro. Foto: Ojji/rvi

**K**omisi VI DPR RI menerima aspirasi langsung dari tim kuasa hukum Robot Trading DNA Pro terkait permasalahan investasi yang dihadapi member DNA Pro. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Paguyuban Robot Trading Member DNA Pro. DNA Pro sendiri merupakan platform yang menggunakan aplikasi robot trading yang dijual kepada para anggota DNA Pro.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengatakan telah mendengar aspirasi yang disampaikan Paguyuban Robot Trading Member DNA Pro. Aspirasi ini, nantinya akan diperjuangkan dan

”

**BELUM ADA UPAYA APAPUN DARI BAPPEBTI DAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN UNTUK MENDORONG PENGEMBALIAN DANA KEPADA MEMBER ROBOT TRADING**

disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

“Semua pesan saya pikir sudah kita dengar, apalagi dari ibu Suwarni, tentu itu menambah dasar kita untuk memperjuangkan apa yang bapak ibu rasakan,” ujar Sarmuji dalam RDPU dengan Paguyuban Robot Trading Member DNA Pro, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).

Ia pun menambahkan, beberapa aspirasi yang disampaikan di antaranya adalah terdapat kontradiksi antara Bappebti dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dimana Bappebti menyatakan bahwa robot trading adalah ilegal, sementara Kementerian Perdagangan telah memberikan legalitas berupa penerbitan surat izin usaha penjualan langsung (SIUPL) kepada DNA Pro.

“Kedua, belum ada upaya apapun dari Bappebti dan Kementerian Perdagangan untuk mendorong pengembalian dana kepada member robot trading. Bappebti dinilai terlalu lambat dalam menangani masalah robot trading sehingga kerugian dan korban semakin banyak,” kata Sarmuji saat membacakan catatan rapat.

Lebih lanjut, di tengah penyegekan yang dialami DNA Pro, Kementerian Perdagangan justru melakukan penerbitan izin baru yaitu SIUPL berbasis risiko dengan mekanisme asesmen yang belum jelas. Untuk itu, percepatan regulasi terkait robot trading sangat diperlukan guna menertibkan investasi-investasi ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam RDPU tersebut, salah satu member DNA Pro Suwarni menyampaikan keluhannya sebagai member DNA Pro yang merasa dirugikan karena tidak bisa mengambil kembali dana yang telah diinvestasikannya. Suwarni sebagai tukang urut, mengaku sangat dirugikan, apalagi seluruh tabungannya telah diinvestasikan.

“Saya memohon dengan sangat agar uang saya hasil urut itu bisa kembali lagi. Uang di tabungan saya sudah enggak ada lagi pak, semua saya taruh di DNA itu. Saya memohon dengan sangat ya pak,” ungkap Suwarni kepada Komisi VI DPR RI. ■ **bia/aha**

# Kehadiran Negara Penting Atur Ketersediaan CPO

**K**ehadiran negara dipandang penting untuk mengatur ketersediaan *crude palm oil* (CPO) atau minyak mentah di dalam negeri. Antara kebutuhan minyak dalam negeri dan ekspor harus diseimbangkan, karena produk turunan dari sawit ini adalah minyak goreng yang sudah menjadi hajat hidup orang banyak di dalam negeri.

Demikian penegasan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat mengikuti rapat dengan Dirjen Argo Kemenperin, para pengusaha kelapa sawit, produsen minyak goreng, dan para petani sawit di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5). “Campur tangan negara dibenarkan dalam mengatur, karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Sugeng.

Isu minyak goreng sempat ramai diperbincangkan publik, karena kelangkaan yang membuat masyarakat kesulitan. Minyak goreng kini sudah menjadi industri strategis nasional. Bahkan,

penyebab inflasi ekonomi di dalam negeri salah satunya dipicu oleh keberadaan minyak goreng. Di sinilah, seru Sugeng, negara perlu mengatur *domestic market obligation* (DMO) dan *domestic price obligation* (DPO) menyangkut CPO.

“Misalnya, produksi CPO per tahun 57 juta ton, lantas diterapkan DMO berapa. Misalnya 20 persen. Artinya, seperlima dari

CPO untuk kepentingan dalam negeri dengan harga dipatok berdasarkan DPO. Ini untuk menghindari fluktuasi ketersediaan dalam negeri. Kita sama-sama tahu polabilitasnya sangat tinggi menyangkut komoditas. Hari ini saja harga CPO melompat tinggi. Kalau tidak diatur pasti semuanya diekspor,” ungkap politisi Partai NasDem ini.

Sugeng berpandangan, sebaiknya harga CPO tidak dilepas ke pasar bebas, karena ekonomi nasional tidak menganut paham liberal. “Kita tidak boleh menyerahkan pada mekanisme pasar bebas. Masyarakat kita disparitas kemampuannya masih senjang. Masih perlu kehadiran negara dalam hal subsidi,” tutup Sugeng. ■ mh/aha

”

**PENYEBAB INFLASI EKONOMI DI DALAM NEGERI SALAH SATUNYA DIPICU OLEH KEBERADAAN MINYAK GORENG**



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. Foto: Oji/mvi



# Komisi VIII Minta Warga Lombok Barat Tak Gunakan Politik Identitas dalam Pilkades

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta seluruh pihak yang berkonflik di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara (NTB) pada malam takbiran lalu, awal Mei 2022, untuk tidak mengulangi lagi kejadian pembakaran rumah warga, yang memicu kerusuhan antar umat beragama. Selain itu, Komisi VIII DPR RI meminta warga Lombok Barat tidak menggunakan politik identitas dalam pemilihan kepala desa (pilkades), sehingga dapat menghadapi perbedaan pada sebuah masalah.

Demikian diungkapkan Diah usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Daerah Lombok Barat, Kakanwil Kementerian Agama Lombok Barat, Kapolres Lombok Barat, Pimpinan FKUB Lombok Barat, perwakilan tokoh umat Islam, Kristen,

”

**KITA INGIN SUPAYA ADA ATURAN ATAU KLAUSUL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN POLITIK IDENTITAS.**



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin Kunspek Komisi VIII DPR RI. Foto: Nadya/nvl

Katolik, Hindu, dan Buddha, guna membahas mengenai “Implementasi Moderasi Beragama di Provinsi NTB”, di Lombok, NTB, Senin (23/5).

“Ini yang kita garis bawahi untuk tidak terulang lagi. Kita ingin supaya ada aturan atau klausul dalam pemilihan kepala desa untuk tidak menggunakan politik identitas. Kementerian Sosial juga memberikan bantuan forum keserasian sosial yang sekarang juga semua prosesnya sudah mulai berjalan baik dengan pendekatan musyawarah, pendekatan saling bantu. Dan juga ada tradisi yang diketengahkan atau diadakan bersama antara umat Islam dan umat Buddha.

Dan pada dasarnya ya disepakati dalam forum ini oleh berbagai pihak bahwa ini bukan konflik SARA, melainkan konflik yang berangkat dari pemilihan kepala desa,” jelas Diah.

Diah juga meminta seluruh pihak dapat bersama-sama memperbaiki diri dan me-review masing-masing di luar dari pendekatan dari kementerian terkait. Kepada Kementerian Agama, Diah meminta agar program moderasi beragama dapat segera dikembangkan kepada forum moderasi antar umat beragama, mengingat implementasi di lapangan ada di tangan para tokoh-tokoh

agama yang ada di dalam forum-forum keagamaan tersebut.

“Tokoh-tokoh agama sudah menunggu bahwa program moderasi kerukunan umat beragama ini bisa berjalan di tengah masyarakat, tidak hanya di internal Kementerian Agama, tapi juga di tengah masyarakat. Karena forum-forum dialog seperti inilah yang kita harapkan bisa membangun pertukaran perspektif, silaturahmi, dan kesatuan, karena Indonesia ini kan berangkat dari persatuan. Dan kita juga ingin persatuan itu menjadi modal bagi kita untuk bermuara pada cita-cita nasional kita bersama,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu. ■ ndy/sf

# Komisi VIII Pastikan Kesiapan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji di Jabar

**J**awa Barat merupakan provinsi dengan pengirim calon jemaah haji terbesar di Indonesia. Tak kurang dari 17 ribu jemaah akan diberangkatkan ke Tanah Suci dari Tanah Pasundan ini. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menekankan agar persiapan pemberangkatan dan pelayanan bagi calon jemaah haji betul-betul dilakukan secara matang. Setidaknya ada dua hal yang harus dipastikan yakni layanan dalam negeri dan layanan luar negeri.

“Terkait layanan dalam negeri, pertama kami ingin memastikan calon jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan setoran yang terdistribusi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat,” ujar Ace usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan

Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Perwakilan Pemerintah Provinsi Jabar di Bandung, Jabar, Selasa (24/5).

Politisi Partai Golkar ini meminta agar Kanwil Kemenag Jabar memastikan agar para calon jemaah haji sudah mendapatkan vaksinasi (booster) sebagaimana yang disyaratkan Pemerintah Arab Saudi. Terkait manasik haji, Ace menilai, hal tersebut penting dilaksanakan sebagai bekal dalam pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

Selanjutnya, penting bagi pemerintah untuk memastikan kondisi kesehatan calon jemaah haji di masing-masing daerah. “Dan tak kalah pentingnya, kami ingin memastikan pelayanan embarkasi Jawa Barat (di Bekasi). Kami pastikan apakah kasurnya, layanan *first track*-nya dan layanan lainnya harus betul-betul dipastikan nyaman. Karena sudah 2

tahun tidak dipakai untuk pelaksanaan ibadah haji,” terangnya.

Kemudian terkait layanan luar negerinya, politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II tersebut menerangkan bahwasanya hal tersebut sudah dilakukan Kemenag. Dimana, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sendiri sudah mengunjungi Pemerintah Arab Saudi untuk memastikan pelayanan yang akan diterima para jemaah haji asal Indonesia.

“Dirjen Haji (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah/PHU) sudah memastikan dari mulai akomodasi catering hingga transportasi selama di sana. Itu semua harus kami pastikan. Walaupun masih situasi pandemi, kami ingin calon jemaah haji tetap menjaga prokes agar terhindar dari penularan Covid-19,” pungkas Ace. ■ es/aha



Foto bersama Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Kanwil Kemenag Jawa Barat dan perwakilan Pemprov Jawa Barat. Foto: Erman/nvl





Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Medan, Sumatera Utara. Foto: Ria/mvl

# Komisi VIII Tinjau Persiapan Ibadah Haji Tahun 2022 di Sumut

**P**emerintah Arab Saudi memberikan kesempatan untuk memberangkatkan calon jemaah haji setelah dua tahun berturut-turut tidak memberangkatkan calon jemaah haji. Namun, penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M sangat berbeda dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi jumlah jemaah, kondisi di Arab Saudi dan kebijakan lainnya.

Untuk itu, guna mengoptimalkan pelayanan terhadap calon jemaah haji, Tim Kunjungan Kerja Sepsifik Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Sumatera Utara, Perwakilan Kepala Kantor Kemenag Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Kepala UPT Asrama Haji Medan dan jajarannya dalam rangka pengawasan persiapan pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022 M di Medan, Sumatera Utara, Senin (23/5).

“Pertemuan ini sangat penting sebagai upaya untuk menjalin komunikasi yang intensif antara lembaga legislatif, dalam hal ini Komisi VIII DPR RI dengan pelaksana kebijakan bidang agama di daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang agama, dan lebih khusus lagi pelayanan terhadap calon jemaah haji,” jelas Marwan dalam sambutannya.

Setelah dua tahun berturut-turut Indonesia tidak memberangkatkan calon jemaah haji, menurut Marwan tahun ini merupakan tahun krusial. Sehingga harus menjadi tonggak keberhasilan kita untuk meyakinkan kepada negara-negara lain, terutama kepada Arab Saudi, bahwa Indonesia mampu dan berhasil dalam membina, melayani, dan melindungi para jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. “Keberhasilan kita pada tahun ini akan sangat menentukan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun mendatang,” ungkapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Komisi VIII DPR RI pada 13 April 2022 lalu telah melakukan pembahasan dengan Menteri Agama RI terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022, bahkan sebelum adanya pengumuman kepastian kuota dari Arab Saudi dengan menggunakan asumsi kuota 50 persen dari tahun 2019. Estimasi kuota tersebut tidak jauh berbeda dengan kuota riil, sehingga diperkirakan tidak akan terlalu mempengaruhi besaran biaya komponen BPIH. Perbedaannya hanya pada komponen biaya yang berasal dari nilai manfaat keuangan haji yang akan menyesuaikan dengan kuota riil. ■ rnm/sf

# Komisi IX Pastikan Kesiapan Layanan Kesehatan JCH di Embarkasi Makassar

**K**omisi IX DPR RI meninjau persiapan pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan ibadah haji di Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan pihaknya ingin memastikan seluruh rangkaian dari tahap persiapan hingga penyelenggaraan kesehatan haji kepada calon jemaah haji (CJH) sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga pelaksanaan pemberangkatan haji berjalan baik.

“Kita bersyukur bahwa setelah dua tahun akhirnya Arab Saudi sudah membuka pintu bagi jemaah haji dan Indonesia mendapatkan kuota sebesar 100.000 (jemaah). Karena itu, kami Komisi IX DPR pada hari ini ke Makassar untuk melihat

kesiapan dari pemerintah untuk melayani calon jemaah haji yang akan berangkat ke Arab Saudi,” ungkap Charles usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI meninjau Asrama Haji Sudiang, di Makassar, Sulsel, Rabu (25/5).

Politisi PDI-Perjuangan itu menilai pelaksanaan ibadah haji ditengah pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Agama dan juga Kementerian Kesehatan untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji semaksimal mungkin. Dirinya juga meminta UPT Kementerian Agama RI Perwakilan Sulawesi Selatan dengan para *stakeholder* untuk memiliki komitmen akan protokol kesehatan

sesuai aturan pemerintah yang saat ini berlaku, meski saat ini laju penularan Covid-19 mulai terkendali.

Selanjutnya, Charles mengimbau tenaga kesehatan tetap meningkatkan pelayanan kesehatan promotif dan preventif dengan memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan dan pemahaman pola hidup sehat kepada jemaah haji serta mengenali kondisi kesehatan agar jemaah haji menjaga kesehatannya secara mandiri.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Bachtiar Baso menyampaikan bahwa pihaknya memastikan jemaah calon haji yang masuk di Asrama Haji Embarkasi Makassar saat ini dalam status *istithoah* (mampu dari sisi kesehatan). Sebab seluruh prosedur dan tahapan pelayanan, pemeriksaan dan pengamatan atas kondisi kesehatan sudah dilakukan terhadap jemaah calon haji, khususnya yang berangkat tahun 2022 ini, mulai dari tingkat Puskesmas di setiap daerah asal, termasuk pelaksanaan sejumlah vaksin yang menjadi syarat yang harus dipenuhi seperti meningitis dan *booster* Covid-19.

“Persentase jemaah calon haji yang masuk kategori risiko Tinggi (Risti) tahun ini relatif agak rendah, sebab pihak Arab Saudi menetapkan salah satu syarat bagi calon jemaah haji yakni batasan usia 65 tahun dan harus dipastikan sudah divaksin *booster*,” lapor Bachtiar. ■ ann/sf



Tim Kunspek Komisi IX DPR RI saat meninjau Asrama Haji Sudiang di Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: Anne/nvl



# Komisi IX Tinjau Persiapan Pelayanan Kesehatan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya

persyaratan PCR, harus vaksin, dan ada persyaratan (umur jemaah haji) maksimal 65 tahun,” kata Ninik.

Kemudian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengusulkan untuk dapat disediakan tempat *swab* PCR di Asrama Haji Sukolilo agar menjadi solusi apabila ada jemaah haji yang terkendala tidak melakukan *swab* ketika berangkat dari daerah asalnya dan membutuhkan *swab* PCR kembali. Ia juga meminta Kementerian Kesehatan



Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat meninjau Asrama Haji Sukolilo, di Surabaya. Foto: Novel/nvl

**K**omisi IX DPR RI meninjau Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur dalam rangka pengawasan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji tahun 2022 ini. Sebagai informasi, Asrama Haji Sukolilo sempat digunakan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 sejak awal 2020 lalu. Sebab itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya ingin memastikan perihal kebersihan dan kondisi Embarkasi Surabaya itu layak digunakan.

“Asrama haji ini kan kemarin menjadi tempat untuk karantina, jadi kita ingin memastikan tempatnya benar-benar sudah bersih, kemudian (asrama) ini sudah dua tahun tidak dipakai (untuk

embarkasi haji) maka harus dipastikan kondisinya bersih dan layak,” jelas Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Asrama Haji Sukolilo, di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Rabu (25/5).

Ninik juga menilai persiapan kesehatan terhadap calon jemaah haji saat ini tidak boleh sembarangan. Terdapat tiga syarat perjalanan haji dari Pemerintah Arab Saudi yang harus terpenuhi, yaitu syarat vaksinasi Covid-19 minimal vaksin lengkap, PCR 72 jam sebelum keberangkatan dan syarat maksimal umur di bawah 65 tahun. “Kita lihat adalah bagaimana persiapan soal kesehatan karena haji kali ini tidak sembarangan harus ada

(Kemenkes) untuk melakukan mitigasi jika ada jemaah haji yang terkena positif Covid-19, termasuk dalam perawatannya.

“Kita usul, jika *in case* ada persoalan tidak terduga, terdapat jemaah yang *delay*, atau ada yang harus dirawat 2-3 hari, sehingga (masa berlaku) PCR dari daerah itu sudah lebih dari 72 jam, jadi harus di PCR lagi, itu kita harus tetap siapkan (swab PCR) di (asrama) sini. Saya juga sudah bilang ke Dinas Kesehatan dan juga Kemenkes, di sini juga harus ada mitigasi kalau ternyata saat PCR ada yang positif Covid-19, harus dirawat dimana dan bagaimana yang harus lakukan,” pungkas legislator daerah pemilihan Jatim III tersebut. ■ nvl/sf

# Calon Jemaah Haji Embarkasi Medan yang Sudah Vaksin Lengkap Baru 76 Persen

**W**akil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengatakan, dengan telah diizinkan lagi penyelenggaraan ibadah haji oleh Pemerintah Arab Saudi, maka Pemerintah Indonesia mendapat kuota haji tahun 2022 sebanyak 100.051 jemaah. Atas dasar itu, ungkap Ansory, persiapan penyelenggaraan

keberangkatan jemaah haji terus dilakukan oleh pemerintah.

"Berhubung pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 masih dalam masa pandemi Covid-19, Pemerintah Arab Saudi menetapkan beberapa persyaratan agar perjalanan haji bisa dilakukan, antara lain yaitu jemaah telah divaksinasi Covid-19 minimal vaksin lengkap (dosis 2), PCR 72 jam sebelum keberangkatan, dan maksimal jemaah haji berumur 65 tahun," ucap Ansory di sela-sela memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Embarkasi Haji Medan, di Medan, Sumatera Utara, Rabu (25/5).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan, berdasarkan data yang disampaikan oleh Pusat Kesehatan Haji pada tanggal 17 Mei 2022, calon jemaah haji yang sudah vaksinasi lengkap Covid-19 baru mencapai 76 persen. Sehingga baru sebanyak 76 persen itu saja calon jemaah haji yang bisa berangkat ke tanah suci.

Atas dasar hal tersebut, lanjutnya, Komisi IX DPR RI ingin mengetahui lebih jauh tentang hal ini, khususnya di Embarkasi Haji Medan, sekaligus mendorong agar percepatan vaksinasi kepada calon jemaah haji untuk bisa dilakukan sesegera mungkin, mengingat pemberangkatan calon jemaah haji terakhir pada gelombang kedua masih pada 3 Juli 2022.

"Selain itu kami juga ingin mengetahui kesiapan petugas haji dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada calon jemaah haji yang melakukan ibadah di tanah suci," ujarnya. Ansory menyatakan, Komisi IX DPR RI telah menganggarkan anggaran haji untuk tahun 2022 ini sebesar Rp400 miliar.

"Saat ini jumlah calon jemaah haji yang sudah melakukan vaksin meningitis baru mencapai 55 persen, sedangkan yang telah melakukan vaksin Covid-19 sebanyak 76 persen. Oleh karenanya kami akan mengawasi terus, agar saat pemberangkatan gelombang pertama dan kedua di tanggal 10 Juni dan 21 Juni 2022 nanti jumlah jemaah yang sudah divaksin meningitis bisa mencapai seratus persen," pungkas legislator dapil Sumatera Utara III itu. ■ dep/aha

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar.  
Foto: Devi/nvl





# Komisi X Serap Aspirasi dan Informasi Akurat Bidang Pendidikan di Aceh



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bertukar cenderamata dengan Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh beserta jajaran Pemrov Aceh. Foto: Ayu/hvl

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memimpin Kunjungan Kerja

Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Aceh, guna menyerap berbagai aspirasi di bidang Pendidikan. Dalam kunjungan kali ini, tim Komisi X mendengar berbagai aspirasi dari bidang pendidikan di provinsi tersebut.

“Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Bangsa tahun ini kami, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, secara khusus atau spesifik menjangkau masukan atau aspirasi serta informasi akurat

terkait berbagai permasalahan di bidang Pendidikan,” ujar Hetifah usai pertemuan dengan Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M. Jafar dan jajaran Pemerintah Provinsi Aceh, di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (20/5).

Berbagai masukan tersebut diantaranya terkait permintaan peningkatan Tunjangan Profesi Guru di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) yang selama ini masih sangat minim. Bahkan peningkatan program pelatihan calon guru. Serta masih kurangnya sarana dan prasarana serta berbagai kebutuhan yang diperlukan

untuk sekolah-sekolah dari PAUD, SD, SMP, dan SMA serta perguruan tinggi.

Hetifah berjanji akan membahas hasil temuan, aspirasi dan masukan dari Pemerintah Provinsi Aceh, serta berbagai elemen di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, serta bidang olahraga dan kepemudaan di Aceh untuk dibahas bersama pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian terkait untuk menjadi sebuah rekomendasi.

Dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh M. Jafar mengungkapkan bahwa pembenahan di dunia pendidikan terus dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Aceh. Salah satunya bukti nyata adalah keberhasilan Aceh menjadi peringkat lima besar nasional dari jumlah kelulusan siswa/i SMA dan SMK yang

”

**PERMINTAAN PENINGKATAN TUNJANGAN PROFESI GURU DI DAERAH 3T (TERLUAR, TERTINGGAL, TERDEPAN) YANG SELAMA INI MASIH SANGAT MINIM. BAHKAN PENINGKATAN PROGRAM PELATIHAN CALON GURU.**

diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam pengumuman Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2022.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMP), diketahui jumlah siswa/i SMA dan SMK dari Provinsi Aceh yang terdaftar pada SNMPTN tahun 2022 mencapai 14.768 orang dan yang diterima 5.793 orang. Jumlah itu meningkat 167 orang bila dibandingkan dengan hasil penerimaan siswa/i yang lolos pada tahun 2021 yaitu 5.626 orang. ■ ayu/aha

# Ratna Juwita Pertanyakan Alokasi Dana Abadi Pesantren Tak Tercantum di APBN 2022

**A**nggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak mencantumkan secara jelas alokasi Dana Abadi Pesantren dalam belanja APBN 2022. Padahal, menurut Anggota Fraksi PKB DPR RI ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah lama disahkan dan pendapatan negara dalam *outlook*-nya melebihi dari apa yang diproyeksikan.

“Padahal, kalau misalnya pendapatan negara itu naik otomatis *mandatory* pendidikan yang 20 persen (di dalam UUD) juga akan naik,” ujar Ratna dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan beserta jajaran, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5).

Diketahui, dalam paparan Menkeu Sri Mulyani di hadapan Banggar DPR RI, *outlook* APBN 2022 diperkirakan mencapai Rp2.266,2 triliun, atau lebih tinggi 46,2 persen dari asumsi awal APBN 2022 sebesar Rp1.846 triliun. Sehingga, diproyeksikan terdapat selisih sekitar Rp 420 triliun di akhir tahun 2022 nantinya. Pendapatan negara yang meningkat tersebut

diperoleh terbesar dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.784 triliun dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp481,6 triliun.

Karena itu, merujuk pada kenaikan pendapatan negara tersebut, Ratna berharap komitmen pemerintah untuk terhadap kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga, termasuk dengan pemberian alokasi Dana Abadi Pesantren dalam belanja APBN 2022. “Jadi, kami harap untuk menyikapi kenaikan pendapatan ini, kami ingin pemerintah juga mengawal komitmennya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat supaya semua itu bisa terdistribusi dengan baik,” ujar Ratna.

Diketahui, selain menjadi mandat dalam UU Pesantren, Dana Abadi Pesantren tersebut juga tertuang dalam Perpres No 82 Tahun 2021 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 September 2021 silam. Penyusunan Perpres ini dilakukan oleh Kementerian Agama dengan melibatkan para pihak dari lintas kementerian/ lembaga negara dan stakeholders pesantren. Melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2021, pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren. ■ rdn/sf



Anggota Banggar DPR RI  
Ratna Juwita Sari.  
Foto: Munchen/nvl



# BK DPR Tandatangani MoU dengan UIR



Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul (dua dari kanan) pada sesi foto bersama usai penandatanganan MoU jajaran Universitas Islam Riau (UIR). Foto: Kresno/nvl

**K**epala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menandatangani nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BK-DPR RI dengan Universitas Islam Riau (UIR). Sensi, sapaan akrab Inosentius mengatakan, MoU yang ke-58 antara BK-DPR dengan berbagai perguruan tinggi ini memiliki nilai yang penting.

“Kenapa MoU ini penting, karena karakter atau bentuk kegiatan yang ada di BK DPR memang sangat dekat dengan hal-hal yang bersifat akademis. Sehingga BK DPR perlu bermitra dan tentunya akan memberikan manfaat baik bagi BK-DPR maupun bagi perguruan tinggi,” ujar Sensi usai penandatanganan MoU di Gedung Rektorat UIR, Pekanbaru, Riau, Kamis (19/5).

Menurut Sensi, dengan adanya MoU tersebut, DPR RI akan lebih leluasa untuk melibatkan para akademisi untuk ikut menyusun draf naskah akademik

”

**INI BIASANYA TERGANTUNG KOMPETENSI DI SUATU UNIVERSITAS. INI MERUPAKAN UNIVERSITAS ISLAM DAN KEBETULAN ADA BEBERAPA RUU YANG TERKAIT DENGAN KEAGAMAAN**

dan rancangan UU yang ditugaskan AKD kepada BK DPR. “Dengan demikian ketika BK DPR membutuhkan ahli, dan kebetulan ahlinya ada di UIR, maka kita akan mengikutsertakan para ahli tersebut,” ujar Sensi.

Menurutnya ini merupakan suatu hubungan timbal balik antara DPR RI dengan perguruan tinggi, karena jika mahasiswa ataupun dosen ingin melakukan riset, DPR RI akan sangat

terbuka dan banyak bahan yang dapat dijadikan objek riset untuk mahasiswa ataupun dosen.

“Rencana ke depannya, ini biasanya tergantung kompetensi di suatu universitas. Kebetulan UIR ini merupakan Universitas Islam dan kebetulan ada beberapa RUU yang terkait dengan keagamaan seperti UU Zakat yang akan kita lakukan FGD, lalu ada juga beberapa dari Tim Panja Komisi VIII DPR RI yang akan melakukan evaluasi terhadap UU Pendidikan Keagamaan itu juga nanti akan kita libatkan (UIR),” ujar Sensi.

Sensi juga mengatakan, UIR nantinya bukan hanya terlibat dalam masalah pembahasan Rancangan Undang-Undang yang bersifat keagamaan saja, akan tetapi ada juga bidang lain yang akan dimanfaatkan keahliannya dari UIR oleh Bk Setjen DPR RI. ■ eno/sf



Wakil Ketua BURT Achmad Dimiyati Natakusumah saat memimpin BURT DPR RI meninjau Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo. Foto: Hira/nvl

# BURT Pantau Layanan Joumpa Airport VIP Service di Bandara Komodo

**B**adan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja pengawasan terhadap layanan Joumpa Airport VIP Service & Lounge yang dipimpin Wakil Ketua BURT Achmad Dimiyati Natakusumah di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (13/5). Dalam kunjungan tersebut,

BURT DPR RI melihat pengelolaan bandara serta melihat fasilitasnya.

“Kita ingin melihat layanan Gapura dan Joumpa di mana sudah kerja sama dengan DPR, melihat pelayanan terbaik untuk anggota DPR dan keluarganya seperti apa. Jadi kita melihat kesiapan. Apa lagi di bandara yang banyak dikunjungi wisatawan, tadi kita melihat masih ada kekurangan seperti yang

disampaikan teman-teman,” ujar Dimiyati usai meninjau Bandara Komodo, di Labuan Bajo, NTT, Jumat (13/5).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mendengar adanya keluhan dan cukup menyayangkan terkait fasilitas sarana dan prasarana yang belakangan tidak dilakukan perawatan dan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dirinya berharap ke depannya pelayanan bandara, maupun Gapura Angkasa dan Joumpa dapat lebih baik.

“Kami minta juga Anggota Dewan di sini kan banyak dapil NTT, jadi betul-betul supaya Joumpa dan Gapura itu menghubungi mereka, say hello atau welcome siapa (ke Anggota DPR) sehingga tahu Anggota Dewan itu bahwa BURT sudah bekerjasama dengan Joumpa dan Gapura. Maka dengan sendirinya, ya mereka tahu supaya bisa menggunakan fasilitas Joumpa atau Gapura itu,” pesan Anggota Komisi III DPR RI tersebut. ■ hal/sf





SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI  
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
MENGUCAPKAN :



**Selamat Hari Kenaikan  
Isa Almasih**